

BUKU PANDUAN &
SURAT PENAWARAN



PROGRAM PENDIDIKAN GELAR

PUSBINDIKLATREN
BAPPENAS

2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	
I. Surat Penawaran.....	2
II. Pendahuluan.....	18
1.1. Latar Belakang	18
1.2. Tujuan	19
III. Program Beasiswa.....	20
2.1. Informasi Program Beasiswa	20
2.2. Persyaratan Program Beasiswa.....	23
2.3. Jadwal Pelaksanaan Program Beasiswa	30
2.4. Pilihan Program Studi	31
2.5. Prosedur Pelamaran.....	33
2.6. Komponen Biaya	34
2.7. Sanksi.....	36
IV. Lampiran.....	37
3.1. Format Pernyataan Rencana Studi.....	37
3.2. Panduan Registrasi <i>Online</i>	38
3.3. Formulir Manual.....	39
3.4. Formulir Pernyataan Pengembangan SDM.....	42



SURAT PENAWARAN



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 3103705
www.bappenas.go.id

Nomor : 1136/P.01/07/2019

30 Juli 2019

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **Seleksi Program Beasiswa Pusbindiklatren
Bappenas Tahun 2020**

Yth.:

1. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian/SDM Kementerian/Lembaga;
 2. Asisten Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia;
 3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota (daftar terlampir).
- (Daftar terlampir)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah serta meningkatkan kualitas layanan dan kinerja PNS agar dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para PNS yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, dan/atau para PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan, untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tahun 2020. Program beasiswa meliputi pendidikan gelar jenjang S2 dan S3, baik program dalam negeri, program *linkage* maupun program *Split-Site* Australian Awards in Indonesia (*Split-Site* AAI)

Calon peserta Program Beasiswa **diharuskan mendaftar melalui "Registrasi online"** di situs <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>. **Pendaftaran melalui faksimile dan pos-el (email) tidak kami proses lebih lanjut.**

Proses seleksi Program Beasiswa meliputi tahapan administrasi, tes potensi akademik (TPA) dan *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL). Persyaratan administrasi berupa dokumen pendukung harus dikirimkan secara langsung atau melalui jasa pengiriman ke: **Pusbindiklatren Bappenas (Beasiswa Pendidikan Gelar), Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320, paling lambat tanggal 29 September 2019 (cap pos).**

Dokumen pendukung pengusulan calon penerima beasiswa yang perlu dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa gelar S2;

2. Hasil cetak formulir registrasi *online* yang telah diisi lengkap, bermaterai, bertanda tangan asli calon peserta dan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta stempel cap basah pada posisi tanda tangan Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD;
3. Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
4. Salinan SK keangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
5. Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi (formulir terlampir); serta
6. Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan.

Dapat kami sampaikan pula bahwa pada Program Beasiswa 2020, kami tidak menerima nilai seleksi individual (TPA dan TOEFL), sehingga seluruh calon peserta yang memenuhi syarat administrasi namun **belum/tidak memiliki nilai TPA dan TOEFL** yang ujiannya diselenggarakan oleh Pusbindiklatren sebelumnya, serta sudah tidak berlaku per Agustus 2020, yang bersangkutan diwajibkan mengikuti seleksi nasional yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren.

Panduan Pelaksanaan Program Beasiswa Pusbindiklatren Tahun 2020 disampaikan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi:

Kantor Pusbindiklatren Bappenas
 Bidang Pendidikan dan Pelatihan Gelar
 Jalan Proklamasi no. 70 Jakarta Pusat 10320
 Telepon: 021 31928280, 31928285
 Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id
 Situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
 dan Pelatihan Perencana



Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga;
3. Deputy Sumber Daya Manusia POLRI;
4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten;

Yth.:

I. BIRO KEPEGAWAIAN/SDM DAN PUSDIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA:

1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
2. Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
3. Badan Informasi Geospasial (BIG)
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
5. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
6. Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKAMLA)
7. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
9. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
10. Badan Narkotika Nasional (BNN)
11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
13. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional (BASARNAS)
14. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
15. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
16. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
17. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
18. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
19. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
20. Badan Pusat Statistik (BPS)
21. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
22. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
23. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
24. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
25. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
26. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
27. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
28. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
29. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
30. Kejaksaan Agung
31. Kementerian Agama
32. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
33. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
34. Kementerian Dalam Negeri
35. Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi
36. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
37. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
38. Kementerian Kelautan dan Perikanan
39. Kementerian Kesehatan
40. Kementerian Ketenagakerjaan
41. Kementerian Komunikasi dan Informatika
42. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
45. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia
46. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
47. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
48. Kementerian Luar Negeri
49. Kementerian Pariwisata
50. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
51. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia
52. Kementerian Pemuda dan Olahraga
53. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
54. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
55. Kementerian Perdagangan
56. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN atau Bappenas
57. Kementerian Perhubungan
58. Kementerian Perindustrian
59. Kementerian Pertahanan
60. Kementerian Pertanian
61. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
62. Kementerian Sekretariat Kabinet
63. Kementerian Sekretariat Negara
64. Kementerian Sosial
65. Kepolisian Republik Indonesia
66. Komisi Yudisial
67. Mahkamah Konstitusi
68. Ombudsman Republik Indonesia
69. Perpustakaan Nasional
70. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
71. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Setjen DPR)
72. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Setjen DPD)
73. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Setjen MPR)

II. SETDA/BADAN/BIRO/BAGIAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

1. Provinsi Aceh

- 1.1. Kabupaten Aceh Barat
- 1.2. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 1.3. Kabupaten Aceh Besar
- 1.4. Kabupaten Aceh Jaya
- 1.5. Kabupaten Aceh Selatan
- 1.6. Kabupaten Aceh Singkil
- 1.7. Kabupaten Aceh Tamiang
- 1.8. Kabupaten Aceh Tengah
- 1.9. Kabupaten Aceh Tenggara
- 1.10. Kabupaten Aceh Timur
- 1.11. Kabupaten Aceh Utara
- 1.12. Kabupaten Bener Meriah
- 1.13. Kabupaten Bireuen
- 1.14. Kabupaten Gayo Lues
- 1.15. Kabupaten Nagan Raya

- 1.16. Kabupaten Pidie
- 1.17. Kabupaten Pidie Jaya
- 1.18. Kabupaten Simeule
- 1.19. Kota Banda Aceh
- 1.20. Kota Langsa
- 1.21. Kota Lhokseumawe
- 1.22. Kota Sabang
- 1.23. Kota Subulussalam

2. Provinsi Sumatera Utara

- 2.1. Kabupaten Asahan
- 2.2. Kabupaten Batubara
- 2.3. Kabupaten Dairi
- 2.4. Kabupaten Deli Serdang
- 2.5. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 2.6. Kabupaten Karo
- 2.7. Kabupaten Labuhan Batu
- 2.8. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
- 2.9. Kabupaten Labuhan Batu Utara
- 2.10. Kabupaten Langkat
- 2.11. Kabupaten Mandailing Natal
- 2.12. Kabupaten Nias
- 2.13. Kabupaten Nias Barat
- 2.14. Kabupaten Nias Selatan
- 2.15. Kabupaten Nias Utara
- 2.16. Kabupaten Padang Lawas
- 2.17. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 2.18. Kabupaten Pakpak Bharat
- 2.19. Kabupaten Samosir
- 2.20. Kabupaten Serdang Bedagai
- 2.21. Kabupaten Simalungun
- 2.22. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 2.23. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2.24. Kabupaten Tapanuli Utara
- 2.25. Kabupaten Toba Samosir
- 2.26. Kota Binjai
- 2.27. Kota Gunung Sitoli
- 2.28. Kota Medan
- 2.29. Kota Padangsidimpuan
- 2.30. Kota Pematang Siantar
- 2.31. Kota Sibolga
- 2.32. Kota Tanjung Balai
- 2.33. Kota Tebing Tinggi

3. Provinsi Sumatera Barat

- 3.1. Kabupaten Agam
- 3.2. Kabupaten Dharmasraya
- 3.3. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 3.4. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.5. Kabupaten Padang Pariaman

- 3.6. Kabupaten Pasaman
- 3.7. Kabupaten Pasaman Barat
- 3.8. Kabupaten Pesisir Selatan
- 3.9. Kabupaten Sijunjung
- 3.10. Kabupaten Solok
- 3.11. Kabupaten Solok Selatan
- 3.12. Kabupaten Tanah Datar
- 3.13. Kota Bukittinggi
- 3.14. Kota Padang
- 3.15. Kota Padangpanjang
- 3.16. Kota Pariaman
- 3.17. Kota Payakumbuh
- 3.18. Kota Sawahlunto
- 3.19. Kota Solok

4. Provinsi Riau

- 4.1. Kabupaten Bengkalis
- 4.2. Kabupaten Indragiri Hilir
- 4.3. Kabupaten Indragiri Hulu
- 4.4. Kabupaten Kampar
- 4.5. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 4.6. Kabupaten Kuantan Singingi
- 4.7. Kabupaten Pelalawan
- 4.8. Kabupaten Rokan Hilir
- 4.9. Kabupaten Rokan Hulu
- 4.10. Kabupaten Siak
- 4.11. Kota Dumai
- 4.12. Kota Pekanbaru

5. Provinsi Kepulauan Riau

- 5.1. Kabupaten Bintan
- 5.2. Kabupaten Karimun
- 5.3. Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5.4. Kabupaten Lingga
- 5.5. Kabupaten Natuna
- 5.6. Kota Batam
- 5.7. Kota Tanjung Pinang

6. Provinsi Jambi

- 6.1. Kabupaten Batanghari
- 6.2. Kabupaten Bungo
- 6.3. Kabupaten Kerinci
- 6.4. Kabupaten Merangin
- 6.5. Kabupaten Muaro Jambi
- 6.6. Kabupaten Sarolangun
- 6.7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 6.8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 6.9. Kabupaten Tebo
- 6.10. Kota Jambi
- 6.11. Kota Sungai Penuh

7. Provinsi Bengkulu

- 7.1. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 7.2. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 7.3. Kabupaten Bengkulu Utara
- 7.4. Kabupaten Kaur
- 7.5. Kabupaten Kepahiang
- 7.6. Kabupaten Lebong
- 7.7. Kabupaten Mukomuko
- 7.8. Kabupaten Rejang Lebong
- 7.9. Kabupaten Seluma
- 7.10. Kota Bengkulu

8. Provinsi Sumatera Selatan

- 8.1. Kabupaten Banyuasin
- 8.2. Kabupaten Empat Lawang
- 8.3. Kabupaten Lahat
- 8.4. Kabupaten Muara Enim
- 8.5. Kabupaten Musi Banyuasin
- 8.6. Kabupaten Musi Rawas
- 8.7. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 8.8. Kabupaten Ogan Ilir
- 8.9. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 8.10. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 8.11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 8.12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 8.13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- 8.14. Kota Lubuk Linggau
- 8.15. Kota Pagar Alam
- 8.16. Kota Palembang
- 8.17. Kota Prabumulih

9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 9.1. Kabupaten Bangka
- 9.2. Kabupaten Bangka Barat
- 9.3. Kabupaten Bangka Selatan
- 9.4. Kabupaten Bangka Tengah
- 9.5. Kabupaten Belitung
- 9.6. Kabupaten Belitung Timur
- 9.7. Kota Pangkal Pinang

10. Provinsi Lampung

- 10.1. Kabupaten Lampung Tengah
- 10.2. Kabupaten Lampung Utara
- 10.3. Kabupaten Lampung Selatan
- 10.4. Kabupaten Lampung Barat
- 10.5. Kabupaten Lampung Timur
- 10.6. Kabupaten Mesuji
- 10.7. Kabupaten Pesawaran
- 10.8. Kabupaten Pesisir Barat
- 10.9. Kabupaten Pringsewu

- 10.10. Kabupaten Tulang Bawang
- 10.11. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 10.12. Kabupaten Tanggamus
- 10.13. Kabupaten Way Kanan
- 10.14. Kota Bandar Lampung
- 10.15. Kota Metro

11. Provinsi Banten

- 11.1. Kabupaten Lebak
- 11.2. Kabupaten Pandeglang
- 11.3. Kabupaten Serang
- 11.4. Kabupaten Tangerang
- 11.5. Kota Cilegon
- 11.6. Kota Serang
- 11.7. Kota Tangerang
- 11.8. Kota Tangerang Selatan

12. Provinsi Jawa Barat

- 12.1. Kabupaten Bandung
- 12.2. Kabupaten Bandung Barat
- 12.3. Kabupaten Bekasi
- 12.4. Kabupaten Bogor
- 12.5. Kabupaten Ciamis
- 12.6. Kabupaten Cianjur
- 12.7. Kabupaten Cirebon
- 12.8. Kabupaten Garut
- 12.9. Kabupaten Indramayu
- 12.10. Kabupaten Karawang
- 12.11. Kabupaten Kuningan
- 12.12. Kabupaten Majalengka
- 12.13. Kabupaten Pangandaran
- 12.14. Kabupaten Purwakarta
- 12.15. Kabupaten Subang
- 12.16. Kabupaten Sukabumi
- 12.17. Kabupaten Sumedang
- 12.18. Kabupaten Tasikmalaya
- 12.19. Kota Bandung
- 12.20. Kota Banjar
- 12.21. Kota Bekasi
- 12.22. Kota Bogor
- 12.23. Kota Cimahi
- 12.24. Kota Cirebon
- 12.25. Kota Depok
- 12.26. Kota Sukabumi
- 12.27. Kota Tasikmalaya

13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- 13.1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- 13.2. Kota Administrasi Jakarta Barat
- 13.3. Kota Administrasi Jakarta Pusat

- 13.4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 13.5. Kota Administrasi Jakarta Timur
- 13.6. Kota Administrasi Jakarta Utara

14. Provinsi Jawa Tengah

- 14.1. Kabupaten Banjarnegara
- 14.2. Kabupaten Banyumas
- 14.3. Kabupaten Batang
- 14.4. Kabupaten Blora
- 14.5. Kabupaten Boyolali
- 14.6. Kabupaten Brebes
- 14.7. Kabupaten Cilacap
- 14.8. Kabupaten Demak
- 14.9. Kabupaten Grobogan
- 14.10. Kabupaten Jepara
- 14.11. Kabupaten Karanganyar
- 14.12. Kabupaten Kebumen
- 14.13. Kabupaten Kendal
- 14.14. Kabupaten Klaten
- 14.15. Kabupaten Kudus
- 14.16. Kabupaten Magelang
- 14.17. Kabupaten Pati
- 14.18. Kabupaten Pekalongan
- 14.19. Kabupaten Pemalang
- 14.20. Kabupaten Purbalingga
- 14.21. Kabupaten Purworejo
- 14.22. Kabupaten Rembang
- 14.23. Kabupaten Semarang
- 14.24. Kabupaten Sragen
- 14.25. Kabupaten Sukoharjo
- 14.26. Kabupaten Tegal
- 14.27. Kabupaten Temanggung
- 14.28. Kabupaten Wonogiri
- 14.29. Kabupaten Wonosobo
- 14.30. Kota Magelang
- 14.31. Kota Pekalongan
- 14.32. Kota Salatiga
- 14.33. Kota Semarang
- 14.34. Kota Surakarta
- 14.35. Kota Tegal

15. Provinsi Jawa Timur

- 15.1. Kabupaten Bangkalan
- 15.2. Kabupaten Banyuwangi
- 15.3. Kabupaten Blitar
- 15.4. Kabupaten Bojonegoro
- 15.5. Kabupaten Bondowoso
- 15.6. Kabupaten Gresik
- 15.7. Kabupaten Jember
- 15.8. Kabupaten Jombang

- 15.9. Kabupaten Kediri
- 15.10. Kabupaten Lamongan
- 15.11. Kabupaten Lumajang
- 15.12. Kabupaten Madiun
- 15.13. Kabupaten Magetan
- 15.14. Kabupaten Malang
- 15.15. Kabupaten Mojokerto
- 15.16. Kabupaten Nganjuk
- 15.17. Kabupaten Ngawi
- 15.18. Kabupaten Pacitan
- 15.19. Kabupaten Pamekasan
- 15.20. Kabupaten Pasuruan
- 15.21. Kabupaten Ponorogo
- 15.22. Kabupaten Probolinggo
- 15.23. Kabupaten Sampang
- 15.24. Kabupaten Sidoarjo
- 15.25. Kabupaten Situbondo
- 15.26. Kabupaten Sumenep
- 15.27. Kabupaten Trenggalek
- 15.28. Kabupaten Tuban
- 15.29. Kabupaten Tulungagung
- 15.30. Kota Batu
- 15.31. Kota Blitar
- 15.32. Kota Kediri
- 15.33. Kota Madiun
- 15.34. Kota Malang
- 15.35. Kota Mojokerto
- 15.36. Kota Pasuruan
- 15.37. Kota Probolinggo
- 15.38. Kota Surabaya

16. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 16.1. Kabupaten Bantul
- 16.2. Kabupaten Gunungkidul
- 16.3. Kabupaten Kulon Progo
- 16.4. Kabupaten Sleman
- 16.5. Kota Yogyakarta

17. Provinsi Bali

- 17.1. Kabupaten Badung
- 17.2. Kabupaten Bangli
- 17.3. Kabupaten Buleleng
- 17.4. Kabupaten Gianyar
- 17.5. Kabupaten Jembrana
- 17.6. Kabupaten Karangasem
- 17.7. Kabupaten Klungkung
- 17.8. Kabupaten Tabanan
- 17.9. Kota Denpasar

18. Provinsi Nusa Tenggara Barat

- 18.1. Kabupaten Bima
- 18.2. Kabupaten Dompu
- 18.3. Kabupaten Lombok Barat
- 18.4. Kabupaten Lombok Tengah
- 18.5. Kabupaten Lombok Timur
- 18.6. Kabupaten Lombok Utara
- 18.7. Kabupaten Sumbawa
- 18.8. Kabupaten Sumbawa Barat
- 18.9. Kota Bima
- 18.10. Kota Mataram

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur

- 19.1. Kabupaten Alor
- 19.2. Kabupaten Belu
- 19.3. Kabupaten Ende
- 19.4. Kabupaten Flores Timur
- 19.5. Kabupaten Kupang
- 19.6. Kabupaten Lembata
- 19.7. Kabupaten Malaka
- 19.8. Kabupaten Manggarai
- 19.9. Kabupaten Manggarai Barat
- 19.10. Kabupaten Manggarai Timur
- 19.11. Kabupaten Ngada
- 19.12. Kabupaten Nagekeo
- 19.13. Kabupaten Rote Ndao
- 19.14. Kabupaten Sabu Raijua
- 19.15. Kabupaten Sikka
- 19.16. Kabupaten Sumba Barat
- 19.17. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 19.18. Kabupaten Sumba Tengah
- 19.19. Kabupaten Sumba Timur
- 19.20. Kabupaten Timur Tengah Selatan
- 19.21. Kabupaten Timur Tengah Utara
- 19.22. Kota Kupang

20. Provinsi Kalimantan Barat

- 20.1. Kabupaten Bengkayang
- 20.2. Kabupaten Kapuas Hulu
- 20.3. Kabupaten Kayong Utara
- 20.4. Kabupaten Ketapang
- 20.5. Kabupaten Kubu Raya
- 20.6. Kabupaten Landak
- 20.7. Kabupaten Melawi
- 20.8. Kabupaten Mempawah
- 20.9. Kabupaten Sambas
- 20.10. Kabupaten Sanggau
- 20.11. Kabupaten Sekadau
- 20.12. Kabupaten Sintang

- 20.13. Kota Pontianak
- 20.14. Kota Singkawang

21. Provinsi Kalimantan Selatan

- 21.1. Kabupaten Balangan
- 21.2. Kabupaten Banjar
- 21.3. Kabupaten Barito Kuala
- 21.4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 21.5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 21.6. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 21.7. Kabupaten Kotabaru
- 21.8. Kabupaten Tabalong
- 21.9. Kabupaten Tanah Bumbu
- 21.10. Kabupaten Tanah Laut
- 21.11. Kabupaten Tapin
- 21.12. Kota Banjarbaru
- 21.13. Kota Banjarmasin

22. Provinsi Kalimantan Tengah

- 22.1. Kabupaten Barito Selatan
- 22.2. Kabupaten Barito Timur
- 22.3. Kabupaten Barito Utara
- 22.4. Kabupaten Gunung Mas
- 22.5. Kabupaten Kapuas
- 22.6. Kabupaten Katingan
- 22.7. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 22.8. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 22.9. Kabupaten Lamandau
- 22.10. Kabupaten Murung Raya
- 22.11. Kabupaten Pulang Pisau
- 22.12. Kabupaten Sukamara
- 22.13. Kabupaten Seruyan
- 22.14. Kota Palangkaraya

23. Provinsi Kalimantan Timur

- 23.1. Kabupaten Berau
- 23.2. Kabupaten Kutai Barat
- 23.3. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 23.4. Kabupaten Kutai Timur
- 23.5. Kabupaten Mahakam Ulu
- 23.6. Kabupaten Paser
- 23.7. Kabupaten Penajam Paser Utara
- 23.8. Kota Balikpapan
- 23.9. Kota Bontang
- 23.10. Kota Samarinda

24. Provinsi Kalimantan Utara

- 24.1. Kabupaten Bulungan
- 24.2. Kabupaten Malinau
- 24.3. Kabupaten Nunukan

- 24.4. Kabupaten Tana Tidung
- 24.5. Kota Tarakan

25. Provinsi Gorontalo

- 25.1. Kabupaten Boalemo
- 25.2. Kabupaten Bone Bolango
- 25.3. Kabupaten Gorontalo
- 25.4. Kabupaten Gorontalo Utara
- 25.5. Kabupaten Pohuwato
- 25.6. Kota Gorontalo

26. Provinsi Sulawesi Selatan

- 26.1. Kabupaten Bantaeng
- 26.2. Kabupaten Barru
- 26.3. Kabupaten Bone
- 26.4. Kabupaten Bulukumba
- 26.5. Kabupaten Enrekang
- 26.6. Kabupaten Gowa
- 26.7. Kabupaten Jeneponto
- 26.8. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 26.9. Kabupaten Luwu
- 26.10. Kabupaten Luwu Timur
- 26.11. Kabupaten Luwu Utara
- 26.12. Kabupaten Maros
- 26.13. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 26.14. Kabupaten Pinrang
- 26.15. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 26.16. Kabupaten Sinjai
- 26.17. Kabupaten Soppeng
- 26.18. Kabupaten Takalar
- 26.19. Kabupaten Tana Toraja
- 26.20. Kabupaten Toraja Utara
- 26.21. Kabupaten Wajo
- 26.22. Kota Makassar
- 26.23. Kota Palopo
- 26.24. Kota Parepare

27. Provinsi Sulawesi Tenggara

- 27.1. Kabupaten Bombana
- 27.2. Kabupaten Buton
- 27.3. Kabupaten Buton Selatan
- 27.4. Kabupaten Buton Tengah
- 27.5. Kabupaten Buton Utara
- 27.6. Kabupaten Kolaka
- 27.7. Kabupaten Kolaka Timur
- 27.8. Kabupaten Kolaka Utara
- 27.9. Kabupaten Konawe
- 27.10. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 27.11. Kabupaten Konawe Selatan
- 27.12. Kabupaten Konawe Utara

- 27.13. Kabupaten Muna
- 27.14. Kabupaten Muna Barat
- 27.15. Kabupaten Wakatobi
- 27.16. Kota Bau Bau
- 27.17. Kota Kendari

28. Provinsi Sulawesi Tengah

- 28.1. Kabupaten Banggai
- 28.2. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 28.3. Kabupaten Banggai Laut
- 28.4. Kabupaten Buol
- 28.5. Kabupaten Donggala
- 28.6. Kabupaten Morowali
- 28.7. Kabupaten Morowali Utara
- 28.8. Kabupaten Parigi Moutong
- 28.9. Kabupaten Poso
- 28.10. Kabupaten Sigi
- 28.11. Kabupaten Tojo Una-Una
- 28.12. Kabupaten Tolitoli
- 28.13. Kota Palu

29. Provinsi Sulawesi Utara

- 29.1. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 29.2. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 29.3. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 29.4. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 29.5. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 29.6. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
- 29.7. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 29.8. Kabupaten Minahasa
- 29.9. Kabupaten Minahasa Selatan
- 29.10. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 29.11. Kabupaten Minahasa Utara
- 29.12. Kota Bitung
- 29.13. Kota Kotamobagu
- 29.14. Kota Manado
- 29.15. Kota Tomohon

30. Provinsi Sulawesi Barat

- 30.1. Kabupaten Majene
- 30.2. Kabupaten Mamasa
- 30.3. Kabupaten Mamuju
- 30.4. Kabupaten Mamuju Tengah
- 30.5. Kabupaten Mamuju Utara
- 30.6. Kabupaten Polewali Mandar

31. Provinsi Maluku

- 31.1. Kabupaten Buru
- 31.2. Kabupaten Buru Selatan
- 31.3. Kabupaten Kepulauan Aru

- 31.4. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 31.5. Kabupaten Maluku Tengah
- 31.6. Kabupaten Maluku Tenggara
- 31.7. Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 31.8. Kabupaten Kepulauan Seram Barat
- 31.9. Kabupaten Kepulauan Seram Timur
- 31.10. Kota Ambon
- 31.11. Kota Tual

32. Provinsi Maluku Utara

- 32.1. Kabupaten Halmahera Barat
- 32.2. Kabupaten Halmahera Tengah
- 32.3. Kabupaten Halmahera Timur
- 32.4. Kabupaten Halmahera Utara
- 32.5. Kabupaten Halmahera Selatan
- 32.6. Kabupaten Kepulauan Sula
- 32.7. Kabupaten Pulau Morotai
- 32.8. Kabupaten Pulau Taliabu
- 32.9. Kota Ternate
- 32.10. Kota Tidore Kepulauan

33. Provinsi Papua

- 33.1. Kabupaten Asmat
- 33.2. Kabupaten Biak Numfor
- 33.3. Kabupaten Boven Digoel
- 33.4. Kabupaten Deiyai
- 33.5. Kabupaten Dogiyai
- 33.6. Kabupaten Intan Jaya
- 33.7. Kabupaten Jayapura
- 33.8. Kabupaten Jayawijaya
- 33.9. Kabupaten Keerom
- 33.10. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 33.11. Kabupaten Lanny Jaya
- 33.12. Kabupaten Memberamo Raya
- 33.13. Kabupaten Memberamo Tengah
- 33.14. Kabupaten Mappi
- 33.15. Kabupaten Merauke
- 33.16. Kabupaten Mimika
- 33.17. Kabupaten Nabire
- 33.18. Kabupaten Nduga
- 33.19. Kabupaten Paniai
- 33.20. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 33.21. Kabupaten Puncak
- 33.22. Kabupaten Puncak Jaya
- 33.23. Kabupaten Sarmi
- 33.24. Kabupaten Supiori
- 33.25. Kabupaten Tolikara
- 33.26. Kabupaten Waropen
- 33.27. Kabupaten Yahukimo
- 33.28. Kabupaten Yalimo

33.29. Kota Jayapura

34. Provinsi Papua Barat

- 34.1. Kabupaten Fakfak
- 34.2. Kabupaten Kaimana
- 34.3. Kabupaten Manokwari
- 34.4. Kabupaten Manokwari Selatan
- 34.5. Kabupaten Maybrat
- 34.6. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 34.7. Kabupaten Raja Ampat
- 34.8. Kabupaten Sorong
- 34.9. Kabupaten Sorong Selatan
- 34.10. Kabupaten Tambrau
- 34.11. Kabupaten Teluk Bintuni
- 34.12. Kabupaten Teluk Wondama
- 34.13. Kota Sorong



BUKU PANDUAN

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional diperlukan rencana pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu salah satu peran Kementerian PPN/Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN dan RKP) yang berkualitas tersebut maka salah satu sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas adalah tercapainya proses integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun di antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan yang berkualitas tersebut, diperlukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) aparatur pemerintah yang bekerja di badan atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyiapkan, merumuskan, dan menyusun, serta melakukan pemantauan rencana pembangunan baik di instansi pusat dan daerah. Peningkatan kualitas ASN perencana diarahkan tidak saja hanya pada peningkatan pengetahuan dan keahlian perencana, tapi juga diarahkan pada perilaku perencana yang profesional.

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) mempunyai tugas dan Fungsi dalam melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta institusi perencana di pusat dan daerah. Peningkatan kompetensi ASN perencana dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik gelar maupun non-gelar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur sipil negara di berbagai bidang perencanaan pembangunan. Program Pendidikan Gelar terdiri dari program S2 di dalam negeri dan luar negeri, program S2 *Linkage* (1 tahun di dalam negeri dan 1 tahun di luar negeri), serta S3 baik di dalam dan luar negeri.

Pada tahun 2019, Jumlah peserta yang mengikuti seleksi gelar Pusbindiklatren sebanyak 3.777 orang, dan sebanyak 2.396 yang lulus seleksi administrasi untuk mengikuti proses seleksi akademik. Dari hasil seleksi akademik, terdapat sebanyak 425 orang yang bisa ditempatkan dalam program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas dengan rincian 2 karyasiswa program S2 Reguler Jepang, 30 karyasiswa program S2 Afirmasi Dalam Negeri, 48 karyasiswa program S2 *Linkage* Premium, 79 karyasiswa program S2 *Linkage* Jepang, 252 karyasiswa program S2 Dalam Negeri dan 14 karyasiswa program S3 Dalam Negeri.

Sejalan dengan fungsinya sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana dan dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN untuk mendukung sinergi perencanaan pusat dan daerah, Kementerian PPN/Bappenas membuka kesempatan bagi para ASN yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas, unit perencanaan di kementerian/lembaga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau unit kerja setingkat yang menangani perencanaan, unit perencanaan di organisasi pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota **dan/atau** unit kerja lainnya yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan, untuk mengikuti Program Beasiswa yang dikelola Pusbindiklatren Bappenas tahun 2020. Program beasiswa meliputi pendidikan gelar jenjang S2, baik program dalam negeri maupun program *linkage*.

1.2. Tujuan

Tujuan pemberian beasiswa Pusbindiklatren Bappenas adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintah yang bertugas pada bidang perencanaan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

PROGRAM BEASISWA

2.1. Informasi Program Beasiswa

Dalam pelaksanaan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2019, kami menawarkan program beasiswa untuk:

- Program S2 Dalam Negeri di 25 (dua puluh lima) program studi pada 11 (sebelas) universitas dalam negeri, yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren untuk jangka waktu perkuliahan selama kurang lebih 18 bulan;
- Program S2 *Linkage* Jepang di 4 (empat) program studi pada 4 (empat) universitas dalam negeri di Indonesia yang bekerja sama dengan universitas di Jepang. Peserta dalam program ini akan mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) tahun di salah satu universitas di Indonesia dan 1 (satu) tahun berikutnya di Jepang dengan mendapat 2 (dua) gelar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk program *linkage* di Institut Pertanian Bogor (IPB), proses perkuliahan dilaksanakan dengan mekanisme selama 1 (satu) tahun di IPB, 1 (satu) tahun berikutnya di Jepang, dan karyasiswa diharuskan melanjutkan kembali perkuliahan di IPB, dengan durasi perkuliahan secara keseluruhan mencapai 36 bulan;
 - Sementara untuk durasi pelaksanaan program *linkage* di Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, dan Universitas Gadjah Mada ialah 24 bulan (1 tahun perkuliahan di Indonesia dan 1 tahun perkuliahan di Jepang);
 - Sebelum kuliah S2 *Linkage* dimulai, Pusbindiklatren memberikan beasiswa persiapan Bahasa Inggris di Pusat Bahasa yang ditunjuk oleh Pusbindiklatren selama kurang lebih 5,5 bulan untuk mencapai nilai IELTS minimal 6,5;
 - Apabila peserta tidak dapat mencapai nilai IELTS minimal 6,5 yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai TOEFL selama mengikuti tahun pertama program S2 *Linkage* Jepang di Indonesia;
 - Sebelum perkuliahan di Jepang dimulai, Pusbindiklatren memberikan beasiswa persiapan Bahasa Jepang (*Basic Japanese Language Training*) di pusat bahasa yang ditunjuk oleh Pusbindiklatren selama kurang lebih 1,5 bulan, kecuali program *linkage* IPB Jepang tidak ada BJLT;
 - Apabila tidak lulus seleksi ke luar negeri, maka yang bersangkutan akan meneruskan perkuliahan di dalam negeri, dan untuk itu hanya memperoleh 1 (satu) gelar dari universitas di dalam negeri;
- Program S2 *Linkage* Australia yang diselenggarakan di 4 (empat) program studi pada 3 (tiga) universitas dalam negeri di Indonesia yang bekerja sama dengan universitas di Australia. Peserta dalam program ini akan mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) tahun di salah satu universitas di Indonesia dan 1 (satu) tahun berikutnya di Australia dan mendapatkan 2 (dua) gelar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sebelum kuliah S2 *Linkage* dimulai, Pusbindiklatren memberikan beasiswa persiapan Bahasa Inggris di Pusat Bahasa yang ditunjuk oleh Pusbindiklatren selama kurang lebih 5,5 bulan untuk mencapai nilai IELTS minimal 6,5;

- Apabila peserta tidak dapat mencapai nilai IELTS minimal 6,5 yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai TOEFL selama mengikuti tahun pertama program S2 *Linkage* Australia di Indonesia;
- Apabila tidak lulus seleksi ke luar negeri, maka yang bersangkutan akan meneruskan perkuliahan di dalam negeri, dan untuk itu hanya memperoleh 1 (satu) gelar dari universitas di dalam negeri;
- Program S2 *Linkage* Jerman yang diselenggarakan di program studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro yang bekerja sama dengan universitas di Jerman. Peserta dalam program ini akan mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) tahun di salah satu universitas di Indonesia dan 1 (satu) tahun berikutnya di Jerman dan mendapatkan 2 (dua) gelar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sebelum kuliah S2 *Linkage* dimulai, Pusbindiklatren memberikan beasiswa persiapan Bahasa Inggris di Pusat Bahasa yang ditunjuk oleh Pusbindiklatren selama kurang lebih 5,5 bulan untuk mencapai nilai IELTS minimal 6,5;
 - Apabila peserta tidak dapat mencapai nilai IELTS minimal 6,5 yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai TOEFL selama mengikuti tahun pertama program S2 *Linkage* Jerman di Indonesia;
 - Apabila tidak lulus seleksi ke luar negeri, maka yang bersangkutan akan meneruskan perkuliahan di dalam negeri, dan untuk itu hanya memperoleh 1 (satu) gelar dari universitas di dalam negeri;
- Program S2 *Linkage* Belanda yang diselenggarakan di 5 (lima) program studi pada 5 (lima) universitas dalam negeri di Indonesia yang bekerja sama dengan universitas di Belanda. Peserta dalam program ini akan mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) tahun di salah satu universitas di Indonesia dan 1 (satu) tahun berikutnya di Belanda dan mendapatkan 2 (dua) gelar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sebelum kuliah S2 *Linkage* dimulai, Pusbindiklatren memberikan beasiswa persiapan Bahasa Inggris di Pusat Bahasa yang ditunjuk oleh Pusbindiklatren selama kurang lebih 5,5 bulan untuk mencapai nilai IELTS minimal 6,5;
 - Apabila peserta tidak dapat mencapai nilai IELTS minimal 6,5 yang bersangkutan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan nilai TOEFL selama mengikuti tahun pertama program S2 *Linkage* Jerman di Indonesia;
 - Apabila tidak lulus seleksi ke luar negeri, maka yang bersangkutan akan meneruskan perkuliahan di dalam negeri, dan untuk itu hanya memperoleh 1 (satu) gelar dari universitas di dalam negeri;
- Program S2 *Split-Site* Australian Awards in Indonesia (*Split-Site* AAI) yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya dan University of Technology Sydney. Peserta dalam program ini akan mengikuti perkuliahan selama 1 (satu) tahun di Universitas Brawijaya dan 1 (satu) tahun berikutnya di University of Technology Sydney, Australia, serta berhak mendapatkan 2 (dua) gelar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Program S2 *Split-Site* Australian Awards in Indonesia (*Split-Site* AAI) yang diselenggarakan di program studi Teknik Pengairan (*Water Resource Engineering*) atau Teknik Sipil (*Civil Engineering*), Pascasarjana Universitas

Brawijaya dan Program *Master of Engineering (Civil Engineering Major or Water Engineering Major)*, University of Technology Sydney (UTS);

- Setelah memenuhi syarat TPA, TOEFL dan wawancara tertulis, peserta akan mengikuti proses wawancara *Australia Awards in Indonesia (AAI)* dan tes IELTS pada bulan **Mei-Juni 2020 (tentative)**;
- Pada tahun pertama, karyasiswa yang terpilih mengikuti Program S2 *Split-Site Australian Awards in Indonesia (Split-Site AAI)* akan mengikuti kuliah di Universitas Brawijaya dengan menggunakan sumber dana beasiswa Pusbindiklatren Bappenas dan selanjutnya akan mengikuti kursus persiapan Bahasa Inggris IALF. Pada tahun kedua, karyasiswa akan mengikuti kuliah di University of Technology Sydney dengan menggunakan sumber dana *Australia Awards in Indonesia (AAI)*;
- S3 Dalam Negeri merupakan program doktoral yang diselenggarakan di universitas dalam negeri yang sudah bekerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas dengan durasi studi maksimal 48 bulan dan **diprioritaskan bagi peserta yang telah memiliki surat penerimaan dari kampus atau *Letter of Acceptance (LoA)***;

2.2. Persyaratan Program Beasiswa

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, dengan ini kami informasikan bahwa untuk Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tahun 2019 akan mengacu kepada persyaratan yang tercantum dalam Surat Edaran Kemenpan RB tersebut dan atau disesuaikan dengan persyaratan dari masing-masing instansi untuk penetapan tugas belajar, yakni:

NO	PERSYARATAN	S3 Dalam Negeri	S2 Dalam Negeri	S2 Linkage/S2 Split-Site
1	SYARAT ADMINISTRATIF			
	Pengusulan Dari Instansi	Eselon II bidang Kepegawaian	Eselon II bidang Kepegawaian	Eselon II bidang Kepegawaian
	Unit Kerja	Unit Kerja Perencanaan	Unit Kerja Perencanaan	Unit Kerja Perencanaan
	PNS 100% Minimal Gol IIIA	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
	Strata Pendidikan Min.	S2	D4/S1*	D4/S1*
	Minimal Tahun Lulus S1/S2	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun
	Umur Maksimal*	40 Tahun	37 Tahun**	37 Tahun**
	IPK Minimal	3.25	2.75	2.75
	Surat Keterangan Rencana Pengembangan SDM	Eselon II bidang Kepegawaian	Eselon II bidang Kepegawaian	Eselon II bidang Kepegawaian
2	SELEKSI NASIONAL			
	Tes Potensi Akademik			
	Pusat	565	565	565
	Pusat Luar Jawa	565	525	525
	Pemerintah Daerah di Jawa	565	525	525
	Pemerintah Daerah di Luar Jawa	565	500	500
	TOEFL Minimal	500	450	500
	IBT/IELTS TOEFL setelah EAP			90/6.5
	Wawancara Tertulis	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen	Menunjukkan Komitmen

Keterangan :

*Tidak semua program studi dapat menerima peserta dengan latar belakang pendidikan D4.

** Batas maksimal usia pendaftar ialah 37 tahun per 1 Agustus 2020 dan atau maksimal kelahiran 31 Juli 1983.

Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa beberapa program studi memiliki perbedaan persyaratan tersendiri diluar dari persyaratan Pusbindiklatren Bappenas, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk program S2 Dalam Negeri di lingkup Institut Teknologi Bandung, minimal nilai *Institutional* TOEFL ialah 475;
- b. Untuk program S2 Dalam Negeri di lingkup Universitas Indonesia, minimal nilai *Institutional* TOEFL ialah 500.

Bagi peserta dengan latar belakang pendidikan D4, berikut kami sampaikan ketentuan di masing-masing program studi:

a. Menerima Calon Karyasiswa lulusan D4

- Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala;
- Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya;
- Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya;
- Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya;
- Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada;
- Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran;
- Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran;
- Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia;
- Magister Studi Kebijakan dan Ilmu Kepemimpinan, Universitas Gadjah Mada

b. Menerima Calon Karyasiswa lulusan D4 dengan syarat

- Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada dengan syarat lulusan dari STTD, STIP dan STPI;
- Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia dengan syarat lulusan dari STAN dan STIS;
- Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro dengan syarat mengikuti perkuliahan tambahan dengan biaya sendiri;
- Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada dengan syarat linear dengan MPWK serta pernah mengikuti minimal diklat JFP Muda yang diselenggarakan oleh Bappenas dan atau lembaga mitra yang setara;
- Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gadjah Mada dengan syarat lulusan STAN, STIS, IPDN/STPDN/IIP, STPN, STIA LAN dan STIE;
- Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro;
- Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan (MEKK), Universitas Indonesia;
- Magister Ilmu Lingkungan dengan Peminatan Geo-Informasi untuk Manajemen Bencana, Universitas Gadjah Mada dengan syarat lulusan IPDN/STPDN/IIP.

c. Tidak Menerima Calon Karyasiswa D4

- Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung;
- Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;
- Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung;
- Magister Pengelolaan dan Sumber Daya Lingkungan Pembangunan, Universitas Brawijaya;
- Magister Sosiologi, Universitas Gadjah Mada;
- Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas;
- Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor;

- Magister Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor;
- Magister Perencanaan Wilayah, Universitas Hasanuddin;

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, kami informasikan juga bahwa untuk daerah-daerah terpencil, tertinggal dan terluar (daftar daerah terlampir), usia maksimal dapat ditetapkan menjadi :

- Program Strata II (S-2) atau setara (baik S2 Dalam Negeri maupun S2 *Linkage*), berusia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun*;
- Program Strata III (S-3) atau setara (baik S3 Dalam Negeri), berusia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019, berikut ini daftar daerah tertinggal yang berjumlah 122 Kabupaten.

NO	PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	KETERANGAN
1	NAD	Aceh Singkil	-
2	Sumatera Utara	Nias Barat	-
3	Sumatera Utara	Nias Utara	-
4	Sumatera Utara	Nias	-
5	Sumatera Utara	Nias Selatan	-
6	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	-
7	Sumatera Barat	Pasaman Barat	-
8	Sumatera Barat	Solok Selatan	-
9	Sumatera Selatan	Musi Rawas	-
10	Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	DOB
11	Bengkulu	Seluma	-
12	Lampung	Lampung Barat	-
13	Lampung	Pesisir Barat	DOB
14	Jawa Timur	Bondowoso	-
15	Jawa Timur	Situbondo	-
16	Jawa Timur	Bangkalan	-
17	Jawa Timur	Sampang	-
18	Banten	Pandeglang	-

NO	PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	KETERANGAN
19	Banten	Lebak	-
20	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	-
21	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah	-
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	-
23	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	-
24	Nusa Tenggara Barat	Dompu	-
25	Nusa Tenggara Barat	Bima	-
26	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	-
27	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	-
28	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	-
29	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	-
30	Nusa Tenggara Timur	Kupang	-
31	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	-
32	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	-
33	Nusa Tenggara Timur	Belu	-
34	Nusa Tenggara Timur	Alor	-
35	Nusa Tenggara Timur	Lembata	-
36	Nusa Tenggara Timur	Ende	-
37	Nusa Tenggara Timur	Manggarai	-
38	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	-
39	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Barat	-
40	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	-
41	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	-
42	Nusa Tenggara Timur	Nagekeo	-
43	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	-
44	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	-

NO	PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	KETERANGAN
45	Nusa Tenggara Timur	Malaka	DOB
46	Kalimantan Barat	Sambas	-
47	Kalimantan Barat	Bengkayang	-
48	Kalimantan Barat	Landak	-
49	Kalimantan Barat	Ketapang	-
50	Kalimantan Barat	Sintang	-
51	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	-
52	Kalimantan Barat	Melawi	-
53	Kalimantan Barat	Kayong Utara	-
54	Kalimantan Tengah	Seruyan	-
55	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	-
56	Kalimantan Utara	Nunukan	-
57	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	DOB
58	Gorontalo	Boalemo	-
59	Gorontalo	Gorontalo Utara	-
60	Gorontalo	Pohuwato	-
61	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan	-
62	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	-
63	Sulawesi Tengah	Donggala	-
64	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong	-
65	Sulawesi Tengah	Tojo Una Una	-
66	Sulawesi Tengah	Sigi	-
67	Sulawesi Tengah	Buol	-
68	Sulawesi Tengah	Banggai Laut	DOB
69	Sulawesi Tengah	Morowali Utara	DOB
70	Sulawesi Selatan	Jeneponto	-

NO	PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	KETERANGAN
71	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	-
72	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	DOB
73	Sulawesi Tenggara	Konawe	-
74	Sulawesi Tenggara	Bombana	-
75	Sulawesi Tenggara	Konawe Kepulauan	DOB
76	Maluku	Maluku Tenggara Barat	-
77	Maluku	Maluku Tengah	-
78	Maluku	Pulau Buru	-
79	Maluku	Seram Bagian Barat	-
80	Maluku	Seram Bagian Timur	-
81	Maluku	Kepulauan Aru	-
82	Maluku	Maluku Barat Daya	-
83	Maluku	Buru Selatan	-
84	Maluku Utara	Halmahera Barat	-
85	Maluku Utara	Halmahera Timur	-
86	Maluku Utara	Kepulauan Sula	-
87	Maluku Utara	Halmahera Selatan	-
88	Maluku Utara	Pulau Morotai	-
89	Maluku Utara	Pulau Taliabu	DOB
90	Papua	Keerom	-
91	Papua	Sarmi	-
92	Papua	Pegunungan Bintang	-
93	Papua	Memberamo Tengah	-
94	Papua	Biak Numfor	-
95	Papua	Supiori	-
96	Papua	Kepulauan Yapen	-

NO	PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	KETERANGAN
97	Papua	Waropen	-
98	Papua	Memberamo Raya	-
99	Papua	Merauke	-
100	Papua	Asmat	-
101	Papua	Mappi	-
102	Papua	Boven Digoel	-
103	Papua	Nabire	-
104	Papua	Intan Jaya	-
105	Papua	Deiyai	-
106	Papua	Dogiyai	-
107	Papua	Paniai	-
108	Papua	Jayawijaya	-
109	Papua	Lanny Jaya	-
110	Papua	Yalimo	-
111	Papua	Yahukimo	-
112	Papua	Tolikara	-
113	Papua	Puncak	-
114	Papua	Puncak Jaya	-
115	Papua	Nduga	-
116	Papua Barat	Sorong	-
117	Papua Barat	Sorong Selatan	-
118	Papua Barat	Maybrat	-
119	Papua Barat	Tambrau	-
120	Papua Barat	Raja Ampat	-
121	Papua Barat	Teluk Bintuni	-
122	Papua Barat	Teluk Wondama	-

*Hanya berlaku untuk PNS yang berasal dari Pemerintah Kota/Kabupaten di atas.

2.3. Jadwal Pelaksanaan Program Beasiswa

Jadwal Seleksi Program Beasiswa Pusbindiklatren, Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Surat Penawaran Beasiswa Pusbindiklatren 2020	Juli 2019
2	<i>Deadline Registrasi Online</i>	29 September 2019
3	<i>Deadline Cap Pos Pengiriman Berkas Peserta</i>	29 September 2019
4	Pemanggilan Peserta Seleksi Nasional TPA 2020	21 Oktober 2019*
5	Seleksi Nasional TPA 2019	2 November 2019*
6	Pemanggilan Peserta Seleksi Nasional TOEFL 2019	17 November 2019*
7	Seleksi Nasional TOEFL 2019	30 November 2019*
8	Pengumuman Program S2 <i>Linkage</i> , S2 Dalam Negeri Tahap 1 dan S3 Dalam Negeri	Desember 2019
9	Pengumuman Program S2 Dalam Negeri Tahap 2	Mei 2020
10	EAP S2 <i>Linkage</i>	Januari – Juli 2020

*Keterangan : Jika terjadi perubahan jadwal, akan diinformasikan di kemudian hari.

2.4. Pilihan Program Studi

Program S2 Dalam Negeri:

1. Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Syiah Kuala;
2. Magister Perencanaan Pembangunan, Universitas Andalas;
3. Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya;
4. Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia;
5. Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Universitas Indonesia;
6. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia;
7. Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor;
8. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;
9. Magister Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung;
10. Magister Ekonomi Terapan, Universitas Padjadjaran;
11. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran;
12. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro;
13. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro;
14. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada;
15. Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada;
16. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada;
17. Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya;
18. Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Peminatan Manajemen Perencanaan, Universitas Hasanuddin;
19. Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya;
20. Magister Sistem dan Teknik Transportasi, Universitas Gadjah Mada;
21. Magister Ilmu Lingkungan dengan Peminatan Geo-Informasi untuk Manajemen Bencana, Universitas Gadjah Mada;
22. Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung;
23. Magister Pengelolaan dan Sumber Daya Lingkungan Pembangunan, Universitas Brawijaya;
24. Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Institut Pertanian Bogor;
25. Magister Studi Kebijakan dan Ilmu Kepemimpinan, Universitas Gadjah Mada

Program S2 Linkage Jepang:

1. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung dengan:
 - Ritsumeikan University: *Economics, International Relations, Public Service, Environmental and Urban Engineering, Accounting and Management.*

- Graduate School of Media and Governance, Keio University: *Media and Governance, Public Administration*.
 - Hiroshima University: *Economic and Economic Development*
 - Yamaguchi University: *Science and Engineering*
 - Miyazaki University: *Engineering*
2. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada dengan:
- GRIPS: *Development Economics, Finance, Public Policy, Public Administration, City and Regional Planning*.
 - Ritsumeikan University: *Economics, International Relations, Public Service, Environmental and Urban Engineering, Accounting and Management*.
 - Takushoku University: *International Development Studies, Economic and Development Economics, Urban and Regional Planning, Development Planning and Public Administration*.
 - Kobe University: *Development Economics, Development Management, Political Development, International Relations and Public Administration*.
 - Graduate School of Media and Governance, Keio University: *Media and Governance, Public Administration*.
 - Yamaguchi University: *Science and Engineering*
 - Miyazaki University: *Engineering*
3. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro dengan:
- Hiroshima University: *International Development and Cooperative*.
 - International Graduate School Of Social/Yokohama National University: *Urban Innovation*
4. Magister Perencanaan Wilayah, Institut Pertanian Bogor dengan Graduate School of Global Environment Studies (GSGES) dan Graduate School of Agriculture (GSA) Kyoto University.

Program S2 Linkage Australia:

1. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Peminatan Manajemen Perencanaan (*Regional Planning*), Pascasarjana Universitas Hasanuddin dan Program Master Ilmu Lingkungan (*Master of Environmental Science, Environmental Protection*), Griffith University;
2. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia dengan Crawford School of Public Policy, Australian National University;
3. Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Universitas Indonesia dengan Carnegie Mellon University in Australia terkait dengan Public Private Partnership (PPP).
4. Magister Sosiologi, Universitas Gadjah Mada dengan Master of Social Policy di Melbourne University.

Program S2 Linkage Jerman:

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro dengan:

1. Land Management, Technical University of Munich (TU Munich);
2. International Cooperation in Urban Development, Technical University of Darmstadt (TU Darmstadt);
3. Urban Management, Institute of Urban and Regional Planning, Technische Universität Berlin.

Program S2 Linkage Belanda:

1. Integrated River, Lowland, and Coastal Development and Management Planning, Universitas Sriwijaya dengan IHE Delft Institute for Water Education; → DELFT
2. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjadjaran dengan Environment and Energy Management, University of Twente → Twente
3. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada dengan:
 - Urban Management and Development, University of Rotterdam → Rotterdam
 - Environment and Infrastructure Planning, University of Groningen → Groningen
4. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung dengan:
 - Infrastructure Management, University of Groningen → Groningen
 - Analysis of Geographic Information, University of Twente → Twente
5. Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia dengan:
 - International Economics and Business, University of Groningen → Groningen
 - Development Studies, Institute of Social Studies → Den Haag

Program S2 Split-Site Australian Awards in Indonesia

S2 *Split-Site* Australian Awards in Indonesia (*Split-Site AAI*) yang diselenggarakan di Program Studi Teknik Pengairan (*Water Resource Engineering*) atau Teknik Sipil (*Civil Engineering*), Pascasarjana Universitas Brawijaya dan Program *Master of Engineering (Civil Engineering Major or Water Engineering Major)*, University of Technology Sydney (UTS).

Program S3 Dalam Negeri

Seluruh program doktoral yang diselenggarakan di universitas dalam negeri yang sudah bekerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas dengan durasi studi maksimal 48 bulan dan **diprioritaskan bagi peserta yang telah memiliki surat penerimaan dari kampus atau *Letter of Acceptance* (LoA)**

2.5. Prosedur Pelamaran

1. Mereka yang berhak melamar program beasiswa Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di atas dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa S2, serta belum pernah mengambil/memiliki gelar S3 untuk yang melamar beasiswa S3;
2. Peserta yang telah memenuhi persyaratan di atas, diharuskan mengisi formulir pendaftaran **secara online** dan diusulkan secara resmi oleh instansi asalnya melalui

- Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung. Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama-nama pegawai yang diusulkan oleh instansi serta program beasiswa yang diminati;
3. Peserta yang diprioritaskan adalah: a) Fungsional Perencana; b) Perencana di Instansi Perencanaan dan/atau yang bekerja di unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Perencanaan; dan c) PNS yang uraian pekerjaannya berhubungan dengan perencanaan pembangunan;
 4. Pusbindiklatren telah mengirimkan berkas penawaran beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2020 ke seluruh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun Kementerian/Lembaga melalui bagian kepegawaian di masing-masing instansi. Selain itu, kami juga mengunggah berkas penawaran beasiswa Pusbindiklatren pada situs Pusbindiklatren Bappenas di <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>;
 5. Jika peserta mengalami kesulitan dalam proses registrasi *online*, peserta diperkenankan menggunakan formulir manual yang terdapat dalam lampiran;
 6. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang **bermaterai, bertandatangan asli dan stempel cap basah** dengan persetujuan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung;
 7. Formulir pendaftaran harus disertai/dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu:
 - a) Surat usulan dari Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD setempat dengan tembusan eselon 2 atasan langsung, yang menyebutkan nama peserta yang diusulkan dan telah memenuhi semua kriteria yang dipersyaratkan, belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 untuk yang melamar beasiswa gelar S2;
 - b) Salinan ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi dan cap basah;
 - c) Salinan SK kepangkatan III/a dan SK terakhir yang telah dilegalisasi;
 - d) Formulir pernyataan pengembangan SDM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian/SDM/BKD serta disesuaikan dengan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing instansi;
 - e) Dokumen Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) yang terdapat di masing-masing instansi, sesuai dengan surat kami dengan nomor 847/P.01/05/2019 pada tanggal 29 Mei 2019 perihal Hasil dan Tindak Lanjut Kegiatan Rapat Koordinasi dan Workshop Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN Pembangunan;
 - f) Khusus bagi para Pejabat Fungsional Perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisasi; serta
 - g) Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai), sebagaimana format terlampir.

2.6. Komponen Biaya

Informasi terkait dengan biaya yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Bappenas serta biaya yang ditanggung oleh instansi asal, mengacu kepada Buku Panduan Karyasiswa Tahun 2019 serta Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembiayaan Bersama (*Cost Sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai berikut:

2.6.1. Komponen Biaya Pendidikan Gelar Yang Dibiayai Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas

a. Program S3 Dalam Negeri

NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	Biaya Pendidikan (<i>Tuition Fee</i>)	Program	
2	Tunjangan Hidup	Bulan	<i>Lump Sum</i>
3	Tunjangan Buku	Bulan	<i>Lump Sum</i>
4	Tunjangan Operasional	Bulan	<i>Lump Sum</i>
5	Publikasi Ilmiah/Seminar	Program	<i>At Cost Max</i>
6	Tunjangan Penelitian/Komputer	Program	<i>Lump Sum</i>

b. Program S2 Dalam Negeri

NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
1	Biaya Pendidikan (<i>Tuition Fee</i>)	Program	
2	Tunjangan Hidup	Bulan	<i>Lump Sum</i>
3	Tunjangan Buku	Bulan	<i>Lump Sum</i>
4	Tunjangan Operasional	Bulan	<i>Lump Sum</i>
5	Publikasi Ilmiah/Seminar	Program	<i>At Cost Max</i>
6	Tunjangan Penelitian/Komputer	Program	<i>Lump Sum</i>

c. Program S2 Linkage

NO	KOMPONEN BIAYA	SATUAN	KETERANGAN
Tahun Pertama di Indonesia			
1	Biaya Pendidikan (<i>Tuition Fee</i>)	Program	
2	Tunjangan Hidup	Bulan	<i>Lump Sum</i>
3	Tunjangan Buku	Bulan	<i>Lump Sum</i>
4	Tunjangan Operasional	Bulan	<i>Lump Sum</i>
5	Biaya Pemeriksaan Kesehatan	Program	<i>Lump Sum</i>
6	Biaya Psikotes	Program	<i>Lump Sum</i>

Tahun Kedua di Luar Negeri			
1	Biaya Pendidikan (<i>Tuition Fee</i>)	Program	<i>Lump Sum</i>
2	Tunjangan Hidup	Bulan	<i>Lump Sum</i>
3	Tunjangan Buku	Bulan	<i>Lump Sum</i>
4	Tunjangan Penelitian/Komputer	Program	<i>Lump Sum</i>
5	Tunjangan Adaptasi (<i>Settling In Allowance</i>)	Program	<i>Lump Sum</i>
6	Tunjangan Pengiriman Barang (<i>Shipping Allowance</i>)	Program	<i>Lump Sum</i>

*Detail Biaya Dapat Dilihat Dalam Buku Panduan Karyasiswa Tahun 2019

2.7. Sanksi

1. Jika dalam hal tertentu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri dari program studi secara sepihak, maka berdasarkan Surat Perjanjian, peserta **harus** mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Pusbindiklatren sejak proses seleksi hingga tanggal keputusan pembatalan pemberian beasiswa kepada kas negara, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961, Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961, dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
2. Peserta akan **dikenakan sanksi** jika dalam proses seleksi, penempatan, maupun selama mengikuti pendidikan, Pusbindiklatren menemukan data yang tidak sesuai dalam Formulir Calon Penerima Beasiswa Pusbindiklatren (formulir pendaftaran) maupun dengan kriteria seleksi Pusbindiklatren;
3. Sanksi yang dimaksud pada *point* di atas dapat berupa:
 - a) Pembatalan pencalonan sebagai penerima beasiswa jika diketahui sebelum proses seleksi dilakukan;
 - b) Pembatalan pemberian beasiswa dan penggantian biaya seleksi jika diketahui dalam proses penempatan;
 - c) Pertimbangan kembali terhadap instansi dan/atau unit kerja terkait dalam proses penempatan karyasiswa di kemudian hari.

LAMPIRAN

Format Pernyataan Rencana Studi

- Paragraf 1 : Latar Belakang Pendidikan sebelumnya, S1 untuk yang bermaksud mengambil program S2;
- Paragraf 2 : Riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja yang berisikan uraian tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;
- Paragraf 3 : Alasan memilih bidang studi yang diinginkan serta dikaitkan dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan dengan tugas dan fungsi pokok pekerjaan sehari-hari;
- Paragraf 4 : Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia

Panduan Registrasi *Online*

Pendaftaran bagi peserta baru dan belum pernah sama sekali mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas:

1. Silakan masuk ke Menu DAFTAR: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar>
2. Masukkan NIP Anda lalu klik CEK
3. Apabila Anda belum terdaftar, lalu isikan: *User Name*, Nama Lengkap, Email, *Password*, *Re-Password* lalu klik DAFTAR.
4. Kemudian silahkan Anda cek di email untuk melihat notifikasi pemberitahuan aktivasi akun Anda.
5. Lalu klik link aktivasi, nanti akan diarahkan ke halaman lain.
6. Bila ada pertanyaan atau *Alert* klik OK
7. Kemudian *Login* dengan memasukkan NIP dan *Password* yang sebelumnya sudah dibuat.

Pendaftaran bagi peserta yang sebelumnya sudah pernah mengikuti diklat di Pusbindiklatren Bappenas:

1. Untuk mendapatkan *username* dan *password* masuk ke Menu **Lupa Password**: <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar/forgot.php>;
2. Masukkan *email* yang sebelumnya pernah didaftarkan, jika nanti *email* Anda belum terdaftar di data Diklat Pusbindiklatren Bappenas, silakan Anda mengirim *email* ke Pusbindiklatren Bappenas dengan *email address*: pusbindiklatren@bappenas.go.id Perihal *up date email* Anda;
3. Lalu klik KIRIM;
4. Kemudian lihat *email* dan klik *link Forgot Password*;
5. Jika terdapat peringatan/*Alert* klik OK;
6. Silakan klik DIKLAT GELAR/DIKLAT NON GELAR;
7. Lalu isikan formulir yang sudah tersedia;
8. Setelah formulir diisikan semua lalu klik DAFTAR/UBAH;
9. Untuk mendapatkan formulir yang sudah diisikan klik UNDUH;

PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

FORMULIR CALON PENERIMA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA

(ISILAH SEMUA KETERANGAN DENGAN JELAS DAN BENAR.

HARUS DIISI DENGAN HURUF BALOK)

1. Nama Lengkap (Sesuai Ijazah Terakhir) :
2. NIP :
3. Tempat, Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin : L/P
4. Alamat Rumah :
- Kode Pos :
- Kota/Kabupaten :
- Provinsi :
- Telepon/Handphone :
5. Email Address :
6. Instansi (Pemkot/Pemkab/Pemprov/KL) :
7. Unit Kerja Eselon II/III :
8. Alamat Kantor :
- Kode Pos :
- Kota/Kabupaten :
- Provinsi :
- Telepon/Handphone :
- Email Instansi :
9. Jabatan :
- Golongan :
10. Unit/Bagian Tempat Bekerja :
- Apakah Unit Kerja Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
- Apakah Pekerjaan Saudara berkaitan dengan bidang perencanaan? Ya/Tidak
11. Uraikan Secara Singkat Pekerjaan Saudara :
.....
.....
.....
.....
- TMT PNS 100 % Golongan III/A pada S1 :
- Masa Kerja sejak 100 % Golongan III/A :

12. Pendidikan Terakhir : DIV/S1/S2
Perguruan Tinggi :
Fakultas (DIV/S1/S2) :
Jurusan :
Lulus Tahun (DIV/S1/S2) :
IPK : dari

13. Selain beasiswa Pusbindiklatren, apakah sedang mengikuti beasiswa di instansi lainnya? Ya/Tidak

14. Pilihan Rencana Studi S2 :

Tuliskan Urutan Prioritas Pilihan di dalam kurung yang tersedia :

(.....) Program S2 Dalam Negeri

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

(.....) Program S2 *Linkage*

- (.....) *Linkage* Jepang MPWK UGM
- (.....) *Linkage* Jepang MPWK ITB
- (.....) *Linkage* Jepang MPWK Undip
- (.....) *Linkage* Jepang PWL IPB
- (.....) *Linkage* Australia PPW KMP UNHAS
- (.....) *Linkage* Australia PPIE UI
- (.....) *Linkage* Australia MPEKP UI
- (.....) *Linkage* Australia MSOS UGM
- (.....) *Linkage* Jerman MPWK UNDIP
- (.....) *Linkage* Belanda MIL UNPAD
- (.....) *Linkage* Belanda MPWK UGM
- (.....) *Linkage* Belanda MPWK ITB
- (.....) *Linkage* Belanda PPIE UI
- (.....) *Linkage* Belanda ILM Unsri
- (.....) *Split-Site* AAI UB

15. Pilihan Rencana Studi S3 :

(.....) Program S3 Dalam Negeri

16. Tuliskan rencana studi pada program S2/S3 prioritas pertama Saudara ke dalam esai maksimal 500 kata, yang terdiri dari (a) Latar belakang bidang studi

Saudara; (b) Pengalaman kerja yang menerangkan tentang tugas pokok dan fungsi Saudara serta yang anda lakukan di instansi Saudara; (c) Alasan memilih program gelar prioritas pertama Saudara, serta; (d) Rencana penelitian untuk tugas akhir Saudara yang dapat memberikan manfaat secara langsung terhadap instansi/institusi tempat Saudara bertugas dan pembangunan Indonesia. Silakan menggunakan kertas tambahan jika diperlukan.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenarnya. Jika dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima segala sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren Bappenas.

....., 2019

Menyetujui,

Yang Bersangkutan,

(Kepala BKD/Kepala Biro SDM)

(TTD dan Cap Basah)

(Materai 6000 Rupiah)

(.....)

(.....)

Catatan : Formulir dapat digandakan, dan yang diproses hanya yang bertanda tangan dan bermeterai asli. Harap melampirkan Surat Usulan, Formulir Wawancara, FC ijazah dan transkrip, serta SK pangkat terakhir yang dilegalisir.

KOP SURAT
BKD/BIRO KEPEGAWAIAN/BIRO SDM
SURAT PERNYATAAN PENGEMBANGAN SDM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Dengan ini merangkan bahwa, pegawai atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Instansi :

Adalah ASN pada instansi tersebut di atas dan yang bersangkutan memilih program studi beasiswa Pusbindiklatren dengan urutan pilihan program studi sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

**TIDAK DIWAJIBKAN
MELENGKAPI KELIMA PILIHAN**

Pilihan-pilihan program studi tersebut sudah sesuai dengan rencana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada instansi peserta tersebut, sehingga diharapkan keikutsertaan pegawai tersebut akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan serta peningkatan kinerja instansi/institusi pegawai tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2019

Kepala BKD/Kepala Biro SDM,

(Materai 6000, TTD dan Cap Basah)

(.....)
NIP

Tembusan:
Atasan langsung yang bersangkutan.